KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TIMUR

KEPOLISIAN RESOR TUBAN



**RENCANA STRATEGIS**

**KEPOLISIAN RESOR TUBAN**

**TAHUN 2020-2024**

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN

NOMOR: KEP/ 5 /X/2020 TANGGAL, 3 OKTOBER 2020

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Kepolisian Resor Tuban adalah lembaga yang memiliki fungsi menjalankan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban negara. Tugas utama Polres Tuban adalah menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam memenuhi tugas tersebut, Polres Tuban juga mengemban tugas pokok dalam menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak terlepas untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.

Dalam upaya memenuhi tugas pokok dan menjalankan peran-perannya, Polres Tuban perlu memiliki pedoman agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan begitu, Polres Tuban dapat merumuskan, menyusun, dan menyepakati Rencana Strategis Polres Tuban. Rencana Strategis ini selama lima tahun ke depan akan menjadi pedoman untuk acuan Polres Tuban dalam rangka mencapai visi dan mengimplementasikan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dengan indikator-indikator pengukurnya.

Rencana Strategis Polres Tuban periode 2020-2024 adalah penjabaran yang lebih rinci dari Rencana Strategis Polri 2020-2024 yang didasari dari *Grand Strategy* Polri 2005-2025, yang pada saat ini sudah memasuki tahap akhir yaitu tahap *Strive for Excellence*, di mana sebelumnya Polri mengarah untuk menjadi lembaga yang profesional, modern, dan terpercaya. Polres Tuban telah melampaui berbagai macam capaian yang sudah ditentukan pada Rencana Strategis periode sebelumnya, namun ada beberapa area yang perlu diperhatikan.

Sebagai kepingan terakhir dari Grand Strategi Polri 2005-2025, Rencana Strategis Polres Tuban periode 2020-2024 menekankan peran Polres Tuban dalam mendukung Polri menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban melalui terwujudnya fungsi intelijen yang efektif. Berdasarkan visi tersebut, maka Rencana Strategis Polres Tuban dirumuskan dan disusun berdasarkan kondisi umum Polres Tuban, yang meliputi berbagai elemen seperti capaian kinerja Polres Tuban dari Rencana Strategis sebelumnya dan isu strategis yang sedang dan akan dihadapi oleh Polres Tuban.

# DAFTAR ISI

[RINGKASAN EKSEKUTIF i](#_Toc62545210)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc62545211)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc62545212)

[1. Kondisi Umum 1](#_Toc62545213)

[2. Pencapaian Kinerja Polres Tuban 2015-2019 3](#_Toc62545214)

[3. Potensi dan Permasalahan 22](#_Toc62545215)

[4. Analisis SWOT 28](#_Toc62545216)

[BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 32](#_Toc62545217)

[1. Visi 32](#_Toc62545218)

[2. Misi 33](#_Toc62545219)

[3. Tujuan 33](#_Toc62545220)

[**a.** **Tujuan Polda Jatim:** 33](#_Toc62545221)

[**b.** **Tujuan Polres Tuban:** 34](#_Toc62545222)

[4. Sasaran Strategis 35](#_Toc62545223)

[**a.** **Sasaran Strategis Polda Jatim** 36](#_Toc62545224)

[**b.** **Sasaran Strategis Polres Tuban** 36](#_Toc62545225)

[5. Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis Polres Tuban 36](#_Toc62545226)

[6. Penahapan Kebijakan 37](#_Toc62545227)

[BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 38](#_Toc62545228)

[1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jawa Timur 2020-2024 38](#_Toc62545229)

[2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Tuban 2020-2024 46](#_Toc62545230)

[3. Kerangka Regulasi 53](#_Toc62545231)

[4. Kerangka Kelembagaan 62](#_Toc62545232)

[BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 65](#_Toc62545233)

[1. Target Kinerja Polres Tuban 2020-2024 65](#_Toc62545234)

[2. Kerangka Pendanaan 67](#_Toc62545235)

[BAB V PENUTUP 72](#_Toc62545236)

[1. Kaidah Pelaksanaan 72](#_Toc62545237)

[2. Autentifikasi dan Distribusi 73](#_Toc62545238)

**RENCANA STRATEGIS****KEPOLISIAN** **RESOR TUBAN  
TAHUN 2020 - 2024**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES TUBAN

NOMOR : KEP / 5 /X/2020

TANGGAL : 3 OKTOBER 2020

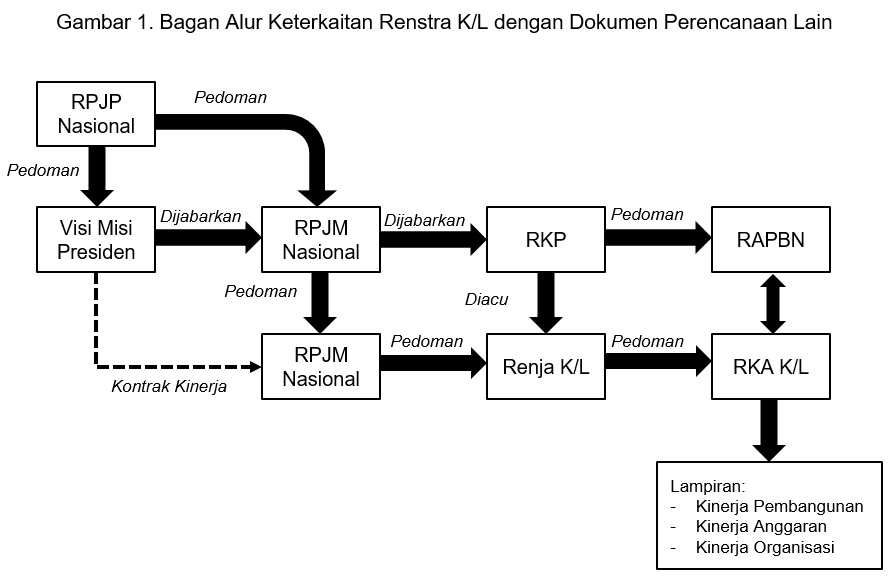
# BAB I PENDAHULUAN

## Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya dilakukan perencanaan pembangunan nasional yang komprehensif. Melalui penyusunan perencanaan yang tertintegrasi antar dokumen, sistematis dan jelas dalam menuangkan gagasan atau rencana, serta terarah tentang akan dibawa kemana suatu organisasi dalam lima tahun ke depan untuk mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada. Renstra organisasi memiliki kedudukan yang strategis dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunannya, Renstra berkedudukan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan turut memperhatikan arah strategis yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) yang terbagi menjadi empat tahap: RPJMN I Tahun 2005-2009; RPJMN II Tahun 2010-2014; RPJMN III Tahun 2015-2019; dan RPJMN IV Tahun 2020-2025.

Sejalan dengan RPJMN, Polri menetapkan 4 (empat) tahapan Renstra yang dibagi menjadi: Renstra Tahap I Tahun 2005-2009 (dengan fokus membangun kepercayaan masyarakat atau *trust building*), Renstra Tahap II Tahun 2010-2014 (dengan fokus membangun kemitraan atau *partnership building*) dan Renstra Tahap III Tahun 2015-2019 dan Renstra Tahap IV (dengan fokus menuju pelayanan unggul atau *strive for excellence*). Memasuki Renstra Tahap IV, Polri diarahkan agar dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan publik yang unggul terkait penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Upaya yang dilakukan dengan peningkatan profesionalitas SDM, pemanfaatan teknologi dan pemutakhiran data, pengikutsertaan partisipasi masyarakat dan penegakan HAM yang pelaksanaannya juga didukung oleh salah satunya Kepolisian Resor Tuban (Polres Tuban) untuk berfokus pada mempertahankan status sebagai organisasi yang unggul (*excellence)*.

Penyusunan Renstra Polres Tuban 2020-2024 mengacu pada dokumen di atasnya yaitu Renstra Polda Jatim 2020-2024 untuk menyelaraskan apa yang ingin dicapai Polda Jatim melalui perencanaan 5 (lima) tahun ke depan yang ikut melibatkan peran Polres Tuban di dalamnya. Polres Tuban merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Tuban yang mengemban tugas memelihara kemananan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Tuban dapat berpedoman pada Renstra Polres Tuban 2020-2024 yang disusun yang berisikan pilihan kebijakan dan strategi yang mampu menjawab tantangan ke depan.



Sesuai dengan teknis penyusunan Renstra yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, visi-misi, tujuan, dan sasaran strategis-indikator yang terdapat di Renstra Polda Jatim perlu diturunkan ke tingkat kewilayah Polres Tuban. Tentunya adopsi yang dilakukan dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Polres Tuban agar dapat mendukung pencapaian Polda Jatim dengan tepat. Selain itu, indikator yang digunakan masih sejalan dan beberapa perubahan pada indikator tetap berkaitan atau mengacu pada indikator 2015-2019 untuk menjaga relevansi dan memastikan kesinambungan pekerjaan di Polres Tuban.

Sebelum pembahasan tentang rincian target, dalam BAB I akan disajikan secara singkat dan jelas tentang kondisi umum Polres Tuban yang merupakan pencapaian kinerja Polres Tuban selama kurun waktu 2015-2019. Capaian ini digunakan sebagai gambaran umum untuk peningkatan kinerja dan perencanaan ke depannya. Kondisi umum yang dimaksud terdiri dari potensi dan permasalahan yang menjadi peluang dan penghambat dalam pelaksanaan pekerjaan, yang dikemukakan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Analisa terhadap potensi dan permasalahan bertujuan untuk menyiapkan tindakan antisipasi atau pencegahan oleh Polres Tuban dalam bentuk langkah-langkah kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Tindakan yang diambil sejalan dengan usaha mewujudkan kemananan dan ketertiban serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tuban.

## Pencapaian Kinerja Polres Tuban 2015-2019

Pelaksanaan Renstra Polres Tuban 2015-2019 telah berjalan cukup baik yang ditandai dengan kondisi Kamtibmas yang terkendali dan memberikan suasana kondusif kehidupan masyarakat serta aktivitas pemerintahan. Peran Polres Tuban sebagai bagian dari pemerintahan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan keamanan di wilayah Kabupaten Tuban, perlu untuk bekerja secara maksimal dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan tersebut. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja untuk menentukan keberhasilan dari Polres Tuban dalam melakukan tugasnya. Berikut pencapaian kinerja Polres Tuban dijabarkan lebih lanjut:

1. Peningkatan Pelayanan Prima Kepolisian

Lembaga kepolisian menjalankan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu fungsi pemerintah disamping regulasi, proteksi dan distribusi. Fungsi pelayanan publik menjadi focus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah Polres Tuban. Oleh karena itu, ditetapkanlah sasaran strategis **terwujudnya peningkatan pelayanan publik Kepolisian untuk meningkatkan pelayanan publik di Polres Tuban**. Indikator kinerja yang digunakan adalah 1) respon time kehadiran di TKP, 2) persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian, dan 3) persentase penyelesaian komplain masyarakat atas pelayanan Kepolisian yang telah ditindaklanjuti. Dengan meningkatnya perhatian terhadap pelanggaran/tindak pidana maka dituntut adanya suatu pelayanan yang maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelayanan maksimal dapat dicapai dengan didukung oleh anggota kepolisian dalam memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk merespon setiap permasalahan tersebut. Kecepatan merespon laporan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Setiap anggota Polri dituntut untuk bersikap proaktif dan responsif terhadap setiap pengaduan dan laporan dari masyarakat untuk segera datang ke TKP dalam melakukan Pengamanan TKP dan olah TKP dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Indikator kinerja pertama adalah **respon time kehadiran di TKP** yangditargetkan oleh Polres Tuban dan jajarannya dengan *Service Level Agreement* (SLA) 30 menit tahun 2019, 45 menit tahun 2018 dan 45 menit tahun 2017. Polres Tuban memiliki capaian sebesar 93,89 %[[1]](#footnote-1) dimana artinya semua kejadian yang dilaporkan mampu dipenuhi kehadirannya untuk mencapai TKP kurang dari 30 menit dengan rata-rata pencapaian tahun 2017-2019 adalah 20 menit, 25 menit dan 25 menit.

Bentuk tindakan yang dilakukan adalah dalam bentuk *Quick Wins* yaitu *Quick Respon* Sabhara dengan kecepatan memberikan pertolongan dan kecepatan datang ke TKP baik dalam kota maupun luar kota. Kunci utama pelaksanaan tugas adalah respon yang sangat cepat dari setiap petugas terhadap semua laporan masyarakat (masalah pidana atau non pidana).

Selain dari segi kecepatan hadir di TKP, kepuasan masyarakat juga dihitung menggunakan indikator kinerja kedua yaitu **persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian**. Realisasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian telah mencapai 100% selama periode 2017-2019 sebagai berikut:

Tujuan diadakannya pengukuran kepuasan masyarakat adalah untuk mendapatkan umpan-balik atas kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Polres Tuban. Melalui survei kepuasan, masyarakat didorong untuk memberikan partisipasi sebagai pengguna layanan agar terjadi peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan atas masalah yang disampaikan. Selain itu, layanan yang diberikan dengan baik kepada masyarakat maka akan memberikan efek domino dimana pelanggan yang puas akan kembali dan memberitahukan kepada lingkungan sekitarnya. Melalui hasil penilaian pelayanan, Polres Tuban melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan untuk dapat senantiasa dilakukan perbaikan.

Keberhasilan kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kerjasama yang baik, kualitas survei dan kekompakan tim. Hal ini menjadi dasar bagi Polres Tuban untuk melakukan survei pengkajian terhadap objek yang lebih fokus dan detail pada bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat serta menjadi perhatian publik yaitu pada bidang pelayanan SIM dan SKCK. Pengukuran kepuasan masyarakat diukur dengan menggunakan survei kepuasan yang dilaksanakan sekali dalam setahun dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan dari pihak pemberi laporan/pengaduan terhadap pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Selain tentang kepuasan masyarakat, Polres Tuban juga berhasil **menurunkan komplain masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian** yang merupakan indikator kinerja ketiga dimana penurunan komplain dari masyarakat mulai dirasakan dan mendapat apresiasi yang cukup baik.

Disamping menurunkan komplain, Polres Tuban juga harus menindaklanjuti komplain masyarakat yang diterima sebagai bentuk apresiasi atas penyampaian informasi dari masyarakat. Pengukurannya menggunakan indikator kinerja **persentase penyelesaian komplain masyarakat atas pelayanan Kepolisian yang telah ditindak lanjuti**. Berikut perkembangan Polres Tuban selama 5 tahun dalam menurunkan komplain masyarakat:

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target adalah adanya jawaban klarifikasi Dumas dari Satreskrim, Satnarkoba dan Polsek jajaran yang belum ditindak lanjuti karena masih dalam proses penyelesaian kasusnya, ketidakpuasan para pengadu terhadap hasil penyelidikan sehingga menambah waktu dalam proses penyelesaian Dumas, dan keterbatasan SDM.

Dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut, dilaksanakan koordinasi dengan Satreskrim, Satnarkoba dan Kasi Propam untuk segera menjawab klarifikasi Dumas, melakukan sosialisasi dengan cara memasang *banner* tata cara pengaduan masyarakat apabila ada anggota melanggar, dan permohonan penambahan anggota kepada Karo SDM Polda Jatim.

1. Situasi dan Kondisi yang Kondusif terbebas dari gangguan Kamtibmas

Kabupaten Tuban yang strategis dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 1,17 juta jiwa merupakan salah satu kabupaten yang menjadi barometer regional dalam bidang ekonomi, politik dan budaya serta tidak ketinggalan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi tugas dan fungsi Polres Tuban termasuk di dalamnya. Pada tahun 2019, kegiatan massal berupa gelaran Pileg, Pilpres dan Pilkada di Kabupaten Tuban berlangsung aman dan terkendali. Hal ini didukung oleh upaya Polres Tuban melaksanakan sinergitas bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Tuban dan menandatangani fakta integritas pemilu damai dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2019.

Disamping itu, bentuk antisipasi gangguan kamtibmas sejak dini yang dilaksanakan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas merupakan program Polri untuk mendekatkan dan membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas bertujuan mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Pencapaian tersebut ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina. Selain itu, diarahkan pada pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Harkamtibmas terutama dalam pembinaan, maka disusunlah sasaran strategis **tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat di wilayah Tuban**. Indikator kinerja pertama yang digunakan adalah **persentase penempatan 1 (satu) Bhabinkamtibmas di setiap desa** dengan realisasi dan target pada grafik 3.

Keberhasilan pencapaian pada tahun 2015 dan 2018 didukung oleh keberadaan jumlah personel yang cukup dan kesadaran akan peran penting pemenuhan Bhabinkamtibmas pada masing-masing desa/keluarahan sebagai representasi keberadaan Polri di tengah masyarakat untuk terciptanya rasa aman. Sedangkan, tidak tercapainya target penempatan 1 (satu) Bhabinkamtibmas di setiap desa pada tahun 2016, 2017 dan 2019 disebabkan karena masih kurangnya personel Bhabinkamtibmas Polres Tuban untuk ditempatkan di seluruh desa yang ada di wilayah dimana dari 328 desa/kelurahan yang ada di Wilayah hukum Polres Tuban baru ditempatkan petugas Bhabinkamtibmas sebanyak 178 pers sehingga belum terpenuhinya Bhabinkamtibmas pada desa/kelurahan. Masih diperlukan definitif Skep yang menjadi landasan penempatan personel agar ditargetkan satu desa satu Bhabinkamtibmas.

Komponen yang juga menyumbang dalam Harkamtibmas adalah pengaktifan siskamling karena siskamling mempunyai daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas ditengah masyarakat. Dalam mewujudkan harkamtibnas dibentuklah strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini dengan membangun kemitraan dengan masyarakat. Dalam proses kemitraan ini, akan dibentuk Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) sebagai sarana komunikasi mencari pemecahan masalah sosial. FKPM ditujukan untuk menemukan, mengidentifikasi akar masalah, dan mencari penyelesaiannya. Polsus juga berperan dalam instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga dilakukan dengan mengedepankan fungsi intelijen dalam memetakan potensi gangguan dan mampu menekan potensi tersebut agar tidak menjadi gangguan nyata. Sasaran strategisnya adalah **terwujudnya peningkatan peran intelijen dalam mendukung terciptanya kamtibmas**. Indikator kinerja yang digunakan yaitu **persentase penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat**. Capaian tahun 2018 diitargetkan sebesar 8 persen dengan realisasi sebesar 20% namun mengalami kenaikan 17,5% dari tahun 2019 sebesar 37,5%. Deteksi inteljen dalam mempetakan daerah rawan telah berhasil mencegah terjadinya gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dengan rasa aman. Pelaksanaan kegiatan rutin dan Operasi Kepolisian untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif terbebas dari gangguan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Polres Tuban juga melaksanakan kegiatan intelijen dengan melakukan pembinaan jaringan, penggalangan baik perorangan maupun kelompok, deteksi kegiatan masyarakat tepat sasaran, tepat waktu dan senantiasa menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan oleh masyarakat serta meningkatkan sinergitas antar pengemban fungsi Intelijen secara lintas sektoral maupun dengan fungsi Kepolisian lainnya. Pemetaan dilakukan terhadap wilayah-wilayah rawan konflik untuk mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan di satuan wilayah dan meningkatkan kualitas produk intelijen yang akurat sebagai *early warning* dan *early detection*. Produk intelijen merupakan informasi yang dapat digunakan oleh fungsi kepolisian lainnya khususnya dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian, pengungkapan kasus serta dalam penyusunan rencana strategi dan rencana kerja Polres Tuban. Oleh karenanya dijadikan sebagai indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya peningkatan peran intelijen dalam mendukung terciptanya kamtibmas dengan target dan realisasinya sebagai berikut:

| **INDIKATOR KINERJA** | **Target/Realisasi** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Persentase produk intelijen yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam giat lintas sektoral | 50%/60% | 52%/55% | 54%/56% | 58%/60% |
| Persentase produk intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi kepolisian lainnya dalam rangka Harkamtibmas | 50%/54% | 50%/58% | 50%/60% | 50%/55% |

Produk intelijen yang dapat digunakan pimpinan dalam giat lintas sektoral merupakan hasil upaya meningkatkan sinergitas lintas sektoral antar instansi pemerintah dan Koforpimda yang sudah terbangun, sebagai langkah langkah *early warning* dalam menjaga situasi kamtibmas di Tuban. Selain itu, didukung dengan dilakukannya anev berkala terkait kuantitas dan kualitas penyusunan produk Intelkam dan produk yang perlu disajikan pada pimpinan dengan memperhatikan dampak kerawanan IPOLEKSOSBUDKAM. Dalam hal produk intelijen yang dapat digunakan oleh fungsi Kepolisian lainnya dalam rangka Harkamtibmas dapat terealisasi melebihi target dengan meningkatkan koordinasi dengan fungsi operasional Kepolisian lainnya sesuai penerapan HTCK sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat saling mendukung serta dapat dimanfaatkannya informasi intelijen guna mendukung terciptanya Harkamtibmas yang kondusif.

Gangguan harkamtibmas tidak hanya terjadi di darat melainkan juga di wilayah perairan. Sebagai wilayah perairan, Kabupaten tuban memiliki garis pantai yang panjang sehingga keamanan di jalur perairan menjadi perhatian yang penting. Sehingga, Polres Tuban menggelar patroli untuk mencegah terjadinya gangguan. Indikator kinerja selanjutnya adalah **penurunan gangguan keamanan pada jalur perairan laut**. Dari target yang ditentukan pada tahun 2016 sebesar 40% telah terealisasi 50%, Kasus gangguan mengalami kenaikan 2 kasus dari tahun 2015 ke tahun 2016, dimana tahun 2016 jumlah gangguan keamanan perairan pantai tuban sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 2 kasus.

Permasalahan yang dialami masyarakat pesisir pantai Kabupaten Tuban adalah perkelahian (perebutan wilayah) penangkapan ikan. Sehingga, para nelayan belum merasa terjamin keselamatannya untuk melakukan pekerjaan dalam menangkap ikan di perairan sepanjang pantai di Kabupaten Tuban.

Realisasi penurunan gangguan keamanan laut yang belum mampu mencapai target 12% dengan realisasi -30% pada tahun 2017 dikarenakan masih sering terjadinya perkelahian antar nelayan di lepas pantai yang dipicu oleh permasalahan rebutan wilayah tangkapan, belum sinerginya koordinasi antara Polair dengan Kamla secara berkesinambungan. Dalam meningatkan keamanan, perlu meningkatkan frekuensi kerjasama operasi dengan instansi berwenang, meningkatkan patroli, melaksanakan sosialisasi kamtibmas kepada nelayan lokal saat beraktivitas mencari ikan dan dampak berbagai bentuk kejahatan di wilayah perairan kepada masyarakat serta menambah personel dalam melaksanakan pengamanan di pelabuhan.

1. Penegakan Hukum

Arti yang terkandung dalam penegakan hukum[[2]](#footnote-2) adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah **terwujudnya peningkatan penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntabel, obyektif, tidak melanggar HAM dan terpenuhinya hak tersangka maupun korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana**.

Indikator yang digunakan untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana adalah **persentase penyelesaian tindak pidana**. Alat ukur ini bertujuan untuk menghitung proporsi antara jumlah kasus yang dapat diselesaikan atau ditangani oleh Polres Tuban dengan keseluruhan kasus yang terjadi (*crime total*). Penyelesaian terhadap 4 (empat) jenis kejahatan meliputi konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi di wilayah Polres Tuban. Pencapaian penyelesaian tindak pidana selama lima tahun sebelumnya periode 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dibawah ini.

Pada tahun 2019, penyelesaian kasus tindak pidana mengalami penurunan 11% dibandingkan tahun 2018. Kejahatan yang dominan paling banyak dilaporkan sepanjang 2019 adalah kejahatan konvensional sebanyak 400 kasus atau 95% dari seluruh kejahatan. Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di wilayah Kabupaten Tuban. Dari total 420 kasus kejahatan yang dilaporkan tahun 2019 menurun dibandingkan kasus yang dilaporkan pada tahun 2018 sebanyak 550 kasus yang berhasil diselesaikan perkaranya sebanyak 387 kasus. Secara penyelesaian perkara pada tahun 2019 menurun 264 kasus (-32%), diiringi dengan penurunan *clearance rate*-nya sebesar -0,23%.

Disamping kejahatan konvensional, Jumlah kasus tindak pidana korupsi oleh Polres Tuban mengalami penurunan dari 28 kasus pada tahun 2018 menjadi 20 kasus pada tahun 2019. Perihal penyelesaiannya, dari 20 kasus masih terdapat 1 kasus yang dalam proses penyelidikan (belum selesai), pada tahun 2017 terdapat 28 kasus tuntas dan 11 kasus yang belum selesai dari total 39 kasus korupsi. Kasus korupsi beragam dari kasus suap, korupsi dana desa, korupsi dana hibah hingga dana APBD. Realisasi penyelesaian yang tidak tercapai oleh Polres Tuban disebabkan adanya kendala dalam penanganan seperti saksi ahli untuk penentuan kasus pidana atau perdata/keuangan negara dan lainnya. Disamping itu, kasus korupsi berkaitan dengan keuangan negara membutuhkan waktu yang cukup lama.

Polres Tuban dalam penyelesaian kasus tindak pidana tidak lepas dari upaya meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian kasus Tindak Pidana dengan berbasis *E-Manajemen* penyidikan. Diperuntukkan agar data pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana bisa dilaporkan secara terpadu dan pimpinan bisa mengetahui hambatan yang dihadapi oleh masing masing penyidik. Pemanfaatan teknologi tersebut melahirkan bentuk mekanisme reformasi birokrasi pemerintah yang baru. Selain itu, profesionalisme dalam penegakan hukum dengan terselenggaranya lidik sidik dengan cepat dan tuntas dan terkuranginya Dumas dan komitmen integritas penyidik yaitu peningkatan penyelesaian perkara sebesar 10% setiap bulannya. Teraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan juga berinovasi untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM). Inovasi yang dilakukan Polres Tuban dan jajarannya untuk meraih predikat WBBM, yakni pembuatan SOP, sertifikasi penyidik, perbaikan sarana dan prasarana ruang pemeriksaan hingga penegakan aturan disiplin bagi anggotanya.

Sasaran strategis **terwujudnya peningkatan penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntabel, obyektif, tidak melanggar HAM dan terpenuhinya hak tersangka maupun korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana** juga diukur dengan **indikator kinerja persentase penyelesaian tindak pidana di wilayah perairan**. Tindak pidana masih banyak dilakukan melalui jalur laut. Kasus-kasus pidana kelautan yang masih sering terjadi di kawasan laut Tuban adalah kecelakaan laut, *illegal fishing*, BBM illegal, Penangkapan udang dengan potasium, pencurian ikan oleh kapal, *illegal logging*, penangkapan ikan dengan kompresor, konflik nelayan, perompakan pipa gas, penyelaman gun kompresor, hingga penebangan mangrove. Dari kasus yang ada tidak semua masuk ke dalam ranah pidana.

Bentuk dukungan lain terhadap penegakan hukum di wilayah Polres Tuban sesuai adalah pelaksaan tupoksinya yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana guna memperlancar pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh karena itu, **terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polres Tuban dengan terpenuhinya sarana dan prasarana** menjadi sasaran strategis Polres Tuban. Indikator kinerja yang digunakan sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | | **Tahun** | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Persentase penambahan Almatsus dan Kapor Polri di Polres Tuban berdasarkan pembiayaan | Target | 3% | 3% | 4% | 4% |
| Realisasi | 7% | 6,86% | 8,1% | 9% |

**Persentase penambahan almatsus dan Kapor Polri di Polres Tuban berdasarkan pembiayaan** dari target sebesar 4% mampu terealisasi sebesar 0% tahun 2018. Almatsus yang termasuk ke dalamnya meliputi Kendaraan, Rantis, Senjata Api, Alat Angkut Air dan Alsus lainnya dengan masing-masing jenisnya mengalami penambahan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Tercapainya target didukung oleh telah terlaksananya sosialisasi terhadap Perkap Nomor 17 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyelenggaraan Presentasi dan Uji Materiil, Fasilitas dan Jasa di Lingkungan Polri, kebutuhan Almatsus dan Kapor Polri yang terpenuhi, dan jumlah data materiil yang sudah sesuai antara riil dan lapangan beserta ADK-nya.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATOR KINERJA** | | **Tahun** | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Persentase penambahan pemenuhan teknologi Kepolisian dan sistem informasi | Target | 6% | 6% | 7% | 7% |
| Realisasi | 8% | 10% | 10% | 15% |

Teknologi informasi adalah sarana atau prasarana, sistem dan metode yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tupoksi Kepolisian, sama halnya di Polres Tuban. Sehingga diukurlah menggunakan **persentase penambahan pemenuhan teknologi Kepolisian dan sistem informasi.** Bentuk pemenuhannya berupa pengembangan fasilitas, peralatan kepolisian dan teknologi informasi kepolisian modern. Dari target sebesar 14% baru terealisasi 13% tahun 2018, disebabkan terbatasnya alokasi anggaran pengadaan materiil untuk pemenuhan teknologi Kepolisian dan sistem informasi.

1. Terwujudnya Keamanan, Keselamatan, dan Ketertiban Lalu Lintas

Polres Tuban dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas menetapkan Sasaran Strategis **terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas**. Pengukuran atas Sasaran Strategis tersebut menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, antara lain: 1) Persentase penurunan jumlah pelanggaran terhadap 5 jenis pelanggaran lalu lintas, 2) Persentase penurunan jumlah laka lantas dan 3) Persentase penurunan tingkat fatalitas korban laka lantas meninggal dunia. Ketiga indikator kinerja ini dipilih karena memiliki keterhubungan satu sama lain dalam menunjang keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalulintas.

**Persentase penurunan jumlah pelanggaran terhadap 5 jenis pelanggaran lalu lintas** merupakan alat ukur untuk mengarahkan Polres Tuban berupaya menurunkan pelanggaran di wilayah Tuban. Semakin besar penurunannya yang semakin mendekati 100% atau sama dengan *zero accident* menunjukkan tidak ada sama sekali pelanggaran yang dilakukan dan semakin besar kesadaran mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas pada 2018 tercatat sebanyak 25.581 pelanggaran dan pada 2019 sebanyak 29.259 pelangaran. Angka tersebut menunjukkan kenaikan pelanggaran lalu lintas sebesar 14,38%. Pada tahun 2017 terjadi sebanyak 32.366 pelanggaran dan pada tahun 2016 sebanyak 22.283 pelanggaran dengan kenaikan sebesar 45,2% pelanggaran. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah khususnya pada usia remaja. Pelanggaran lalu lintas juga masih didominasi masyarakat yang berprofesi karyawan swasta. Dalam mengupayakan pencapaian target, maka perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat atau penitikberatan pada edukasi dan peran aktif anggota Polres Tuban melalui rajin melakukan penilangan untuk menyumbang penurunan pelanggaran.

Selain itu, Polres Tuban melaksanakan Operasi Kepolisian untuk menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta daerah rawan macet. Bentuk Operasi Kepolisian dapat berupa sandi operasi simpatik, patuh dan zebra. Pengendara atau pengguna jalan diharapkan memahami pentingnya berlalu lintas yang aman, berkendara dengan baik dan tidak melanggar rambu-rambu di jalan. Langkah lain yang diambil dengan menyelenggarakan Pembinaan dan Penyuluhan Keselamatan Berlalu Lintas Masyarat Terorganisir dalam menciptakan pengendara yang tertib dalam berlalu lintas. Himbauan yang diberikan berupa pemahaman untuk berpergian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak meminum minuman berakohol dan menggunakan perangkat keselamatan seperti helm saat berkendara.

Indikator kinerja kedua yang digunakan adalah **persentase penurunan jumlah korban kecelakaan lalulintas meninggal dunia**. Realisasi penurunan yang dapat diwujudkan oleh Polres Tuban dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat di bawah ini.

Sepanjang tahun 2019 lalu terjadi 1.141 peristiwa kecelakaan yang menyebabkan 195 nyawa melayang di jalanan Kabupaten Tuban. Angka itu menunjukkan penurunan korban fatalitas kecelakaan bila dibanding tahun 2018. Pada tahun sebelumnya, dari catatan analisis dan evaluasi (anev) Polres Tuban tercatat terjadi 1.393 peristiwa kecelakaan dengan korban meninggal dunia 220 orang akibat kecelakaan. Jumlah peristiwa mengalami penurunan sekitar 18,09%. Sementara untuk angka fatalitas korban meninggal akibat kecelakaan turun 11,36%. Penurunan ini sejalan dengan tingkat pelanggaran di wilayah Tuban juga menurun. Upaya maksimal terus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja Polres Tuban.

Jumlah laka lantas tahun 2017 cenderung mengalami penurunan sebanyak 284 kasus dimana pada tahun 2017 telah terjadi laka lantas sebanyak 1.218 laka lantas dan pada tahun 2016 sebanyak 1.502 laka lantas. Pada 2018 tercatat sebanyak 1.393 kasus lakalantas, sedangkan tahun 2019 terdapat 1141 kasus lakalantas. Angka ini artinya ada penurunan sebesar -18,09% dari tahun sebelumnya.

Faktor kelalaian pengendara menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dari catatan Polres Tuban, pengendara roda dua merupakan pengendara yang dominan mengalami kecelakaan lalu lintas. Faktor lain yang ikut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas berupa jalan yang banyak tikungan, licin dan berlubang serta faktor lingkungan/alam (situasi). Selain itu, ada insiden yang disebabkan oleh kendaraan yang membawa peralatan beban berat di jalan raya, sehingga ini menjadi perhatian Polres Tuban bersama jajarannya dalam melakukan pemantauan. Anggota akan melihat dan mengecek kendaraan yang membawa angkutan berat, jika terbukti membahayakan akan dihentikan terlebih dahulu.

Di samping faktor kelalaian, tidak tercapainya target dipengaruhi beberapa faktor seperti kurangnya personel lalu lintas khususnya di Polsek-Polsek sehingga jika terjadi laka lantas di Polsek penangannya masih ditangani oleh Satlantas Polres. Selain itu, angka kepemilikan kendaraan yang tinggi ini tidak diiringi dengan perkembangan infrastruktur yang mengakibatkan pengguna jalan raya melanggar rambu lalu lintas dan mengabaikan keselamatan. Polres Tuban mengambil langkah untuk mengaktifkan kembali forum lalu lintas di daerah untuk menghasilkan upaya-upaya yang sinergi antara Polantas dengan stakeholder lalu lintas. Polres Tuban selalu menggelorakan semangat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan bagi seluruh pengendara yang dipelopori oleh personel dan keluarga besar Polres Tuban.

Dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas juga diukur dengan indikator kinerja **persentase penurunan jumlah laka lantas.** Berikut realisasi yang diperoleh Polres Tuban dalam menurunkan jumlah laka lantas dengan target sebesar 5%.

Realisasi yang belum tercapai disebabkan karena kurangnya personel lalu lintas khususnya di Polsek-Polsek sehingga jika terjadi laka lantas di Polsek penangannya masih ditangani oleh Sat Lantas Polres. Upaya yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali forum lalu lintas di daerah untuk menghasilkan upaya-upaya yang sinergi antara Polantas dengan stakeholder lalu lintas sehingga diharapkan didapatkan konsep pembangunan jalan dan sarana prasarananya serta memformulasikan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Didukung juga dengan latihan peningkatan kemampuan bagi para petugas lalu lintas baik ditingkat Polres dan Polsek sehingga petugas lalu lintas dilapangan mempunyai keahlian dalam penanganan kasus dan setiap laka lantas yang terjadi di Polsek harus ditangani oleh petugas lantas Polsek setempat.

Polres Tuban juga melaksanakan beberapa hal yang dianggap strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja melalui: membangun kesadaran masyarakat sejalan dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang mengajukan usulan kepada pemerintah agar dibuat atau disepakati Hari Keselamatan Berlalu Lintas di Indonesia yang akan diperingati setiap 31 Maret setiap tahunnya, mengembang sistem penilangan berbasis elektronik untuk dapat menerima data yang lengkap dan akurat terkait pelanggaran di titik-titik rawan pelanggaran serta menjadi alat bantu yang membantu kepolisian Resor dalam penegakan hukum. Sistem ini menjadi bentuk mengadaptasi teknologi dan mengikuti perkembangan era digital dengan melakukan tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE). Disamping itu, membangun partisipasi masyarakat dengan kegiatan edukasi dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Tuban dalam mengajak masyarakat untuk memahami keselamatan berlalu lintas, menanamkan nilai-nilai persetujuan dan disiplin dalam lalu lintas, mentransformasi penanaman nilai-nilai keselamatan lalu lintas mulai dari lingkungan pendidikan serta mematuhi rambu-rambu ketika berkendara.

## Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memahami keadaan dan kondisi di lingkungan Polres Tuban. Lingkungan terus mengalami perubahan yang dinamis sehingga Polres Tuban diharapkan dapat memenuhi tantangan yang ada baik dari internal maupun eksternal. Oleh karenanya, pemetaan potensi dan permasalahan untuk dapat merumuskan strategi Polres Tuban selama 5 (lima) tahun ke depan akan menjadi dasar dalam pengembangan yang tepat dan perolehan hasil yang maksimal. Pengembangan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Tuban. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Polres Tuban pada periode 2020-2024 dibagi menjadi beberapa antara lain:

1. **Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

**Potensi:**

* 1. Koordinasi yang baik dari semua pilar untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menghadapi pilihan politik/preferensi politik yang beragam.
  2. Kerjasama dengan berbagai elemen, kelompok, dan organisasi masyarakat seperti ponpes, keaktifan siskamling dan peningkatan peran kepala desa.
  3. Kecepatan dalam merespon kejadian termasuk kehadiran di TKP sesuai dengan respon time
  4. Peran aktif personil bhabinkamtibmas dan babinsa dalam bersosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kamtibmas.
  5. Dukungan terhadap sarana dan prasarana berupa penyediaan kendaraan dan pembangunan akses jalan untuk menunjang tugas polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
  6. Sinergi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan kamtibmas.
  7. Sinergitas Polri dan kelompok nelayan di Tuban dalam meningkatkan kamtibmas di wilayah Tuban. Melalui hubungan baik antara nelayan di Tuban dapat menciptakan kondisi kondusif dan mengantisipasi gangguan.
  8. Mengintensifkan pengamanan perairan pantai di wilayah Kabupaten Tuban melalui peningkatan patrol laut dalam menganstisipasi tindak kejahatan wilayah perairan laut.

**Permasalahan:**

1. Tantangan industrialisasi juga menjadi sesuatu yang harus sangat dipikirkan mengingat lahan yang tersisa semakin tipis.
2. Paham ekstrimism yang cenderung intoleran terhadap kepercayaan orang lain dan sangat mendorong orang untuk ikut percaya terhadap apa yang dianut dapat bereskalasi menjadi Violent Ekstremism sehingga menjadi masalah ketika tidak didampingi kesigapan dalam mengatasi permasalahan yang muncul.
3. Masih terdapat individu/kelompok yang memiliki ideologinya sendiri namun tidak merujuk pada dasar Negara yaitu Pancasila.
4. Adanya individu/kelompok yang intoleran dalam menyikapi keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku dan agama dapat memicu terjadinya konflik sosial dan bukan tidak mungkin dapat menjadi masalah Negara.
5. Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat kepada status keamanan di suatu wilayah**.**
6. Struktur perekonomian secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah.
7. Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya.
8. Pandemik merupakan epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. Pandemik Covid 19 ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, berbagai penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya,hingga karantina/*lockdown* kota di dunia.
9. Masih adanya beberapa bhabinkamtibmas yang tidak memiliki peralatan yang lengkap.
10. **Penegakan Hukum**

**Potensi:**

1. Pelaksanaan penengakan hukum khususnya pada kejahatan yang mendapat perhatian luas dari publik, salah satunya kasus narkoba.
2. Penyelesaian perkara yang memperhatikan transparasi dan HAM sehingga tidak terjadi diskriminatif.
3. Adanya upaya menghadirkan kehidupan yang demokratis, tengaknya supremasi hukum, dan perlindungan HAM dalam segala tugas dan implementasi kerja Polisi.

**Permasalahan:**

1. Masih berlangsungnya 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi, memerlukan kemampuan Polres Tuban untuk mengungkap dan menanggulangi.
2. Pesatnya teknologi informasi dan telekomunikasi turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak diprediksi sebelumnya seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan, baik melalui pesan singkat (short message service/SMS) maupun melalui jaringan internet.
3. Pengguna aktif sosial media rentan menjadi korban atas kejahatan siber yakni kejahatan berdimensi baru (*New Dimention Crime*) dan telah turut mewarnai aksi-aksi kejahatan di Indonesia.
4. Kerawanan Penyalahgunaan Senpi dan Handak secara ilegal dan tidak menutup kemungkinan penyelundupan yang berasal dari luar negeri.
5. Keterbatasan dana operasional kendaraan patrol dan minimnya kesejahteraan anggota.
6. **Profesionalitas SDM Polres Tuban**

**Potensi:**

* 1. Meningkatkan kualitas SDM di bidang IT dalam menangkap kejahatan di era masa kini.
  2. Pengembangan kompetensi yang dimiliki personel-personel Polres Tuban dalam melakukan tugasnya secara terus menerus.
  3. Penegakan kedisiplinan dan kode etik profesi kepolisian melalui nilai-nilai adat-istiadat.
  4. Menjaga kondisi prima polisi untuk mengawal dan menjaga kondusifitas.

**Permasalahan:**

1. Fungsi komando yang kuat dimana pengaruh pimpinan dirasakan sangat besar sehingga SDM tidak dapat merespon langsung ketika ada kejadian yang membutuhkan tindakan langsung.
2. Keterbatasan sarana dan biaya operasional kerja sehari-hari.
3. Keterbatasan personel polisi dimana besaran ideal tentang rasio penduduk terhadap personel polisi menurut kecamatan tidak merata di seluruh wilayah Tuban.
4. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi personel Polres Tuban.
5. **Modernisasi Teknologi**

**Potensi:**

1. Inovasi berbasis TIK atau *information communication technology* dalam pelayanan publik di Polres Tuban.
2. Pemanfaatan atas perkembangan teknologi seperti pemasangan cctv di sejumlah ruas jalan.
3. Menguatkan sistem IT dalam menyikapi perkembangan kejahatan dengan kecanggihan teknologi dalam melancarkan aksinya.
4. Pengelolaan arsip untuk memudahkan menemukan informasi yang telah disimpan dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK).
5. Penguatan opini positif dan penguatan intelegensia media melalui roadshow dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi.
6. Peran aktif anggota humas Polri dan netizen untuk berperan aktif dalam rangka pembentukan opini positif guna meng-counter semua informasi yang tidak benar di dunia maya.
7. Tersedianya Polsek *Online* untuk akses data dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polda sehingga informasi tetap *update*. Dimana pada pelaksanaannya, menggunakan dua akses, yaitu internet (jaringan terbuka) dan intranet (jaringan tertutup) menggunakan jaringan VPN IP (Virtual Private Network) yang hanya bisa diakses di internal Polri.
8. Pemantauan kejahatan dunia maya (Cyber Crime) dengan Polsek *Online*.

**Permasalahan:**

1. Pemanfaatan teknologi yang belum sepenuhnya optimal di Polres Tuban masih dapat lebih digali dan dimanfaatkan lebih dalam.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan peralatan kebutuhan peralatan teknologi informasi.
3. Masih kurangnya sinergi antara masyarakat dan Polri dalam memerangi dan membentengi Tuban dari ancaman berita hoaks.
4. **Birokrasi dan Pelayanan Publik**

**Potensi:**

1. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi.
2. Laporan kinerja instansi pemerintah yang dapat diukur dan terarah dalam kinerja yang dilakukannya.
3. Pelayanan publik yang semakin membaik dalam pelayanan SIM, STNK dan BPKB disertai keterbukaan dalam hal prosedur, biaya dan waktu.
4. Meningkatkan kualitas layanannya melalui mekanisme yang sistematis dan terstandarisasi.
5. Akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi dimana membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif Polres Tuban semakin meningkat.

**Permasalahan:**

* 1. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja Polres Tuban sangat tinggi.
  2. Birokrasi yang masih dirasa terlalu rumit dan menghambat proses pelayanan itu sendiri.
  3. Beberapa informasi pelayanan publik belum secara jelas disampaikan kepada pengguna layanan.
  4. Sistem, prosedur, target kinerja dan perangkat lunak lainnya seperti etika dan pedoman kerja perlu ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik.
  5. Beberapa data anggaran Satker yang masih sulit diakses oleh masyarakat yang memerlukan.

## Analisis SWOT

Untuk mengantisipasi sejumlah potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerjanya pada periode kerja 2020-2024, Polres Tuban melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:

1. **Kekuatan**
2. Meningkatnya anggaran dari tahun ke tahun dan telah dapat memenuhi kebutuhan operasional Polres Tuban terutama dalam kegiatan operasional dan pemenuhan alat-alat khusus dalam menunjang kegiatan/operasional Polres Tuban.
3. Meningkatnya kemampuan fungsi operasional dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal mining), kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa), kejahatan *transnational crime* (terorisme narkoba) dan kejahatan konvensional (jiwa, harta benda, dan kehormatan) sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Tuban.
4. Terpenuhinya jabatan dan unit-unit baru berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek akan semakin meningkatkan pelayanan Polres Tuban kepada masyarakat.
5. Dukungan sarana dan prasarana yang terpenuhi tentang kebutuhan penambahan fasilitas Polsek serta terdukungnya pembangunan fasilitas guna kelancaran pelayanan Polres Tuban ke masyarakat.
6. Tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Polri Polres Tuban sebagai dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.
7. **Kelemahan**
   1. Masih kurangnya personel di lapangan khususnya di Polsek-Polsek sehingga jika terjadi laka lantas di Polsek penangannya masih ditangani oleh Sat Lantas Polres dalam menghadapi kuantitas kecelakaan yang tinggi. Serta perlunya pelatihan Penanganan kasus Kecelakaan Lalu Lintas, olah TKP dan TP TKP Laka Lantas terhadap Anggota Unit Laka.
   2. Masih terbatasnya kemampuan dan profesional para penyidik lakalantas, berdampak pada kecepatan penyelesaian perkara dan belum sepenuhnya memanfaatkan kerjasama dengan instansi terkait agar transparan, cepat dan tepat sesuai yang diharapkan.
   3. Kuantitas personel Polres Tuban belum memadai sehingga belum menghasilkan hasil didik yang sesuai dengan standar kompetensi dan *Mind Set and Culture* dihadapkan dengan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks.
   4. Rasio perbandingan antara Polri dan penduduk (1:595) belum ideal dapat dipenuhi. Jumlah penduduk Kabupaten Tuban saat ini 1.172.790 jiwa.
8. **Peluang**
   1. Pengelolaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional antara lain kondisi geografis, demografis dan sumber daya alam menjadi peluang dalam menunjang kepentingan nasional.
   2. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) menyediakan peluang bagi Polres Tuban untuk melanjutkan reformasi birokrasi baik dalam aspek struktural, instrumental, maupun kultural.
   3. Reformasi kultural yang telah menunjukkan kemajuan di Polres Tuban dalam menghapus paradigma lama dalam melayani masyarakat. Sehingga, optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima dapat terus dilakukan melalui penggelaran personel dan peralatan Polres Tuban berbasis teknologi.
   4. Membenahi manajemen SDM guna peningkatan kapasitas dan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
   5. Peran Bidang Kehumasan dalam memberikan penerangan tentang agenda pembangunan kepada masyarakat melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat.
   6. Proses rekruitmen maupun pergeseran personel hasil Dikbang atau mutasi yang berkualitas sehingga tercipta postur Polri yang diharapkan guna memberikan sebaran pelayanan prima kepada masyarakat.
   7. Pemanfaatan teknologi berbasis e-manajemen dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana. Sehingga data bisa dilaporkan secara terpadu dan pimpinan bisa mengetahui hambatan yang dihadapi oleh masing masing penyidik.
   8. Cakupan layanan pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang berpeluang untuk ditingkatkan.
9. **Ancaman**
10. Pilkada 2020 memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dari Pilpres. Beberapa kemungkinan terjadinya disharmoni, politisasi SARA dan politik identitas. *Mapping* dan antisipasi koordinasi dilakukan untuk membangun silaturahmi walaupun dinamika-dinamika yang ada berjalan aman damai dan demokrasi dapat berjalan dengan baik.
11. Konflik yang dapat muncul selama masa darurat yang terjadi karena wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19) antara lain upaya pemblokiran akses jalan sehingga menimbulkan kericuhan, seperti penjarahan, penodongan, pemalakan atau kriminalitas sejenisnya, yang berpotensi menghambat akses kendaraan logistik pangan dan medis, serta penolakan pemakaman dan perebutan jenazah Covid 19.
12. Adanya dimensi baru dalam penyebaran kejahatan-kejahatan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak negatif seperti kejahatan siber. Dalam era virtual saat ini baik kejahatan terhadap sistem informasi (*computer crime*) maupun kejahatan lama yang akan lebih mudah dilakukan dengan teknologi informasi (*computer related crime*). Hal tersebut dapat berkontribusi negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat.
13. Gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat di perairan. Potensi perairan Kabupaten Tuban yang luas belum sepenuhnya dapat dijaga secara maksimal akibatnya membuka peluang terjadinya pelanggaran.
14. Keberagaman pelanggaran di perairan dimana tidak hanya pada persoalan *illegal fishing*, berkembang menjadi pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, ketidaklengkapan dokumen perizinan penangkapan, tidak mengaktifkan kelengkapan alat komunikasi. Pelanggaran terus meluas ke human trafficking, pasokan dan peredaran Narkoba, pasokan dan distribusi senjata untuk kepentingan kejahatan.

# 

# BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana dipaparkan dalam Bab I, Polres Tuban telah menetapkan visi, misi dan tujuan organisasinya sebagai organisasi yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, serta penuh dengan koordinasi dan sinergi dalam melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan tersebut, maka Polres Tuban dapat bekerja secara lebih terarah dan efektif. Anggota Polres Tuban akan semakin terdorong untuk bekerja secara cerdas, berbudaya, dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan kreativitas dalam menghadapi tantangan tugas di masyarakat ke depan.

## Visi

1. **Visi Polda Jatim:**

**“*Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh daerah Hukum Polda Jatim* “.**

Makna Visi **Polda Jatim**:

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi **Polda Jatim**.

1. **Visi Polres Tuban:**

**“*Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh daerah Hukum Polres Tuban*.”**

Makna Visi Polres Tuban:

Kabupaten Tuban menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres Tuban.

## Misi

1. **Misi Polda Jatim:**

**“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polda Jatim.”**

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan  
perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

1. **Misi Polres Tuban:**

**“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polres Tuban.”**

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan  
perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

## Tujuan

1. **Tujuan Polda Jatim:**
2. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Jatim.
3. Menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur.
4. Mewujudkan SDM Polda Jatim yang profesional.
5. Modernisasi pelayanan Polda Jatim.
6. Menerapkan manajemen Polda Jatim yang terintegrasi dan terpercaya
7. **Tujuan Polres Tuban:**

Tujuan dan sasaran strategis Polres Tuban disusun berdasarkan hasil identifik asi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Polres Tuban yang ditujukan untuk mendukung visi dan misi Polda Jatim TA. 2020 – 2024, menetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Tuban.

Melalui tujuan ini Polres Tuban melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pencapaian tujuan pertama ini akan diukur dengan indikator nilai Indek Keamanan dan ketertiban

1. Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Tuban.

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan penegakan hukum secara berkeadilan. Pencapaian tujuan kedua ini akan diukur dengan indikator nilai Indek Penegakan Hukum.

1. Terwujudkan SDM Polres Tuban yang profesional.

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan Profesionalisme SDM Polres Tuban. Pencapaian tujuan ketiga ini akan diukur dengan indikator nilai Indeks Profesionalitas SDM Polres Tuban.

1. Terwujudnya Modernisasi pelayanan Polres Tuban.

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan Modernisasi Teknologi. Pencapaian tujuan keempat ini akan diukur dengan indikator :

1. Survey Kepuasan Penggunaan Jaringan Komunikasi Radio dan Data.
2. Persentase terpenuhinya pengajuan dukungan Almatsus Polri
3. Persentase Counter Opini Negatif
4. Terwujudnya manajemen Polres Tuban yang terintegrasi dan terpercaya.

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan manajemen Polres Tuban yang terintegrasi dan terpercaya. Pencapaian tujuan kelima ini akan diukur dengan indikator :

1. Nilai AKIP
2. Nilai RBP
3. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)
4. Nilai Kinerja Anggaran
5. % Penanganan pengaduan masyarakat
6. % Kemenangan dalam pemberian bantuan hukum

## Sasaran Strategis

Sasaran di strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Polres Tuban, yang memberikan *outcome* dari program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Tuban. Untuk mencapai hal tersebut Polres Tuban menetapkan Sasaran Strategis yang diturunkan dari Sasaran Strategis Polda Jatim. Dalam merumuskan sasaran strategis di lingkungan Polres Tuban, ada beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu: mengukur pencapaian tujuan; mencerminkan berfungsinya outcomes dari program; selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan Polda Jatim, sesuai dengan tugas dan fungsi Polres Tuban, dan tetap sesuai dengan visi dan misi; memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran strategis Polda Jatim; jelas dan terukur; dan dilengkapi dengan indikator dan target.

Berikut adalah penjabaran untuk Sasaran Strategis Polda Jatim dan Sasaran Strategis Polres Tuban 2020-2024:

### **Sasaran Strategis Polda Jatim**

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu, “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”, maka sasaran strategis Polda Jatim 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakan Hukum Secara Berkeadilan.
3. Profesionalisme SDM Polda Jatim.
4. Modernisasi Teknologi Polda Jatim.
5. Sistem pengawasan Polda Jatim yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.
6. **Sasaran Strategis Polres Tuban**

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu, “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”, maka sasaran strategis Polres Tuban 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakan Hukum Secara Berkeadilan.
3. Profesionalisme SDM Polres Tuban.
4. Modernisasi Teknologi Polres Tuban.
5. Sistem pengawasan Polres Tuban yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

## Keterkaitan Sasaran Impact, Tujuan dan Sasaran Strategis Polres Tuban

| **Tujuan** | **Sasaran Strategis** |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| * + - 1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Tuban. | 1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. |
| * + - 1. Menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Tuban. | 1. Penegakan Hukum Secara Berkeadilan. |
| * + - 1. Mewujudkan SDM Polres Tuban yang profesional. | 1. Profesionalisme SDM Polres Tuban. |
| * + - 1. Modernisasi pelayanan Polres Tuban. | 1. Modernisasi Teknologi Polres Tuban. |
| * + - 1. Menerapkan manajemen Polres Tuban yang terintegrasi dan terpercaya. | 1. Sistem pengawasan Polres Tuban yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani. |

## Penahapan Kebijakan

1. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polres Tuban yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia unggul dan berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban juga penegakan hukum Polres Tuban.

1. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Tuban yang terintegrasi yang berbasis TI digital dengan dukungan sarana dan prasarana Polres Tuban yang modern, serta meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban juga penegakan hukum Polres Tuban.

1. Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polres Tuban yang berkualitas dan bersinergi dengan peningkatan kemampuan dan manajemen operasi Polres Tuban, serta meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban juga penegakan hukum Polres Tuban.

1. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polres Tuban yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, dan sinergitas antar Lembaga, baik dari lintas sektoral maupun dari tingkat Polres sampai Polsek. Dengan diiringi oleh upaya meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum Polres Tuban.

1. Tahun 2024

Melanjutkan pemantapan pelayanan publik Polres Tuban yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya dengan sistem layanan eletronik dari Polres sampai Polsek yang terintegrasi. Tidak terlepas dari upaya meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum Polres Tuban yang transparan dengan asas berkeadilan.

**BAB III** **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI  
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

## Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jawa Timur 2020-2024

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Polda Jawa Timur 2020-2024 dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta arah kebijakan dan strategi Polri 2020-2024. Sementara itu, sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, kerangka kinerja dalam Polda Jawa Timur merupakan bentuk turunan langsung dari kerangka kinerja Polri sebagai organisasi pemayung. Dengan demikian, arah kebijakan Polda Jawa Timur sewajarnya mengacu kepada arah kebijakan Polri.

| **Sasaran Strategis** | **Arah Kebijakan** | **Strategi** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| (SS1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Jawa Timur | Pencegahan aksi terorisme, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat | Memetakan potensi aksi terorisme, radikalisme, konflik sosial dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya |
| Melakukan penyelidikan dan penyuluhan yang terfokus kepada pencegahan potensi aksi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kemamanan dan ketertiban masyarakat lainnya |
| Mengoptimalisasikan pengamanan area perairan serta dirgantara daerah hukum Polda Jawa Timur berbasis teknologi |
| Mengoptimalisasikan penanggulangan aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial lainnya |
| Memperkuat sinergi dengan para penyelenggara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri |
| Membangun regulasi yang efektif dan efisien dalam memberikan efek jera bagi para pelaku aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat |
| Pencegahan penyebaran hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat | Meningkatkan proses literasi digital dan manajemen media sosial |
| Menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas |
| Peningkatan kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas | Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas |
| Meningkatkan patroli polisi di beberapa wilayah Jawa Timur |
| Meningkatkan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor |
| Memberantasan penyalahgunaan fasilitas umum berupa jalan raya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab |
| Penghentian konflik antar warga dengan melibatkan peran masyarakat dan komunitas (*Community Policing*) | Memberdayakan masyarakat melalui program polisi masyarakat yang efektif dan efisien |
| Meningkatkan peran dan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola kerukunan antar masyarakat |
| Meningkatkan pembinaan masyarakat desa/kelurahan |
| Mengoptimalisasi edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat |
| Meningkatkan pembinaan polisi khusus pada lembaga-lembaga yang harus memiliki Polsus |
| Penjagaan terhadap kestabilan keamanan masyarakat. | Meningkatkan kesadaran dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Jawa Timur (Kecamatan dan Kelurahan) |
| Meningkatkan fungsi Pos Polisi dalam upaya menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat hingga pada ruang lingkup pemerintahan terkecil |
| Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah Polda Jawa Timur | Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan program-program dan pelaksanaan pencegahan penggunaan narkoba. |
| Meningkatkan proses terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkoba. |
| Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum mereka yang terlibat. |
| Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum para penjahat NAPZA. |
| Meningkatkan proses menemukenali modus-modus peredaran baru dalam penyelundupan narkoba. |
| Meningkatkan pemantauan identitas masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah |
| (SS2) Penegakan Hukum Secara Berkeadilan. | Peningkatan pengungkapan kasus secara objektif dan transparan kepada Publik atau Pihak Terkait | Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Penyidik |
| Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Terkait di dalam dan di luar Negeri |
| Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional (SPPT-TI) | Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker Polri dan aparat penegak hukum |
| Standardisasi data kriminal nasional |
| Mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi |
| (SS3) Profesionalisme SDM Polda Jawa Timur. | Peningkatan kualitas SDM di Polda Jawa Timur | Membentuk Personel Polri berdasarkan mutu pendidikan dan pelatihan SDM yang terencana |
| Membangun sistem pengelolaan kinerja SDM Polri |
| Menyelenggarakan sistem *reward and punishment* kepada personel Polda Jawa Timur secara objektif |
| Peningkatan kompetensi SDM di Polda Jawa Timur | Meningkatkan jumlah SDM Polda Jawa Timur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |
| (SS4) Modernisasi Teknologi Polda Jawa Timur | Menyediakan data dan informasi berbasis media yang *user friendly* | Menyediakan data dan informasi yang mudah diakses untuk kebutuhan keterbukaan informasi publik kepada media dan masyarakat di beberapa alat akses. |
| Mengelola berita atau informasi negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat |
| Memperkuat pengelolaan data operasional Kepolisian Daerah dalam satu sistem pengelolaan data terpusat |
| Menyediakan sarana dan prasarana Polda yang modern dan berbasis teknologi terkini | Memetakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas |
| Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan |
| Menyediakan sarana dan prasarana yang modern dan memiliki kemampuan tekhnologi terkini |
| Membangun *Big Data/Single Data Entry* |
| Meningkatkan akses informasi yang akurat |
| Meningkatkan sistem penanganan masalah |
| Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik |
| (SS5) Sistem Pengawasan Polda Jawa Timur yang akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan melayani | Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat | Meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda |
| Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan SDM Polda dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan. |
| Meningkatkan kemudahan pelayanan data dan informasi nasional |
| Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien | Meningkatkan Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| Meningkatkan kualitas perencanaan secara efektif dan efisen |
| Mengoptimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) |
| Reformasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polda | Membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polda |
| Meningkatkan manajemen kinerja Polda |
| Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polda yang andal |
| Memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) |
| Monitoring dan evaluasi tata laksana Polda Jatim |
| Penataan organisasi tingkat Polda |
| Penataan organisasi tingkat Polsek /Polsubsektor |
| Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri |
| Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif | Penguatan regulasi |
| Penanganan *public complaint* secara efektif dan terpercaya |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Polda Jawa Timur | Meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis TIK |
| Meningkatkan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat |
| Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan *up to date* |
| Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan |

## Arah Kebijakan dan Strategi Polres Tuban 2020-2024

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Polres Tuban 2020-2024 dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan regional tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta arah kebijakan dan strategi Polda Jatim 2020-2024. Sementara itu, sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, kerangka kinerja dalam Polres Tuban merupakan bentuk turunan langsung dari kerangka kinerja Polda Jatim sebagai organisasi pemayung. Dengan demikian, arah kebijakan Polres Tuban sewajarnya mengacu kepada arah kebijakan Polda Jatim.

| **Sasaran Strategis** | **Arah Kebijakan** | **Strategi** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| (SS1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Tuban | Pencegahan aksi terorisme, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat | Memetakan potensi aksi terorisme, radikalisme, konflik social dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya |
| Melakukan penyelidikan dan penyuluhan yang terfokus kepada pencegahan potensi aksi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kemamanan dan ketertiban masyarakat lainnya |
| Mengoptimalisasikan pengamanan area perairan daerah hukum Polres Tuban berbasis teknologi |
| Mengoptimalisasikan penanggulangan aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial lainnya |
| Memperkuat sinergi dengan para penyelenggara fungsi pertahanan dan keamanan Kabupaten Tuban |
| Membangun regulasi yang efektif dan efisien dalam memberikan efek jera bagi para pelaku aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat |
| Pencegahan penyebaran hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat | Meningkatkan proses literasi digital dan manajemen media sosial |
| Menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas |
| Peningkatan kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas | Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas |
| Meningkatkan patroli polisi di beberapa wilayah Kabupaten Tuban |
| Meningkatkan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor |
| Memberantasan penyalahgunaan fasilitas umum berupa jalan raya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab |
| Penghentian konflik antar warga dengan melibatkan peran masyarakat dan komunitas (*Community Policing*) | Memberdayakan masyarakat melalui program polisi masyarakat yang efektif dan efisien |
| Meningkatkan peran dan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola kerukunan antar masyarakat |
| Meningkatkan pembinaan masyarakat desa/kelurahan |
| Mengoptimalisasi edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat |
| Meningkatkan pembinaan polisi khusus pada lembaga-lembaga yang harus memiliki Polsus |
| Penjagaan terhadap kestabilan keamanan masyarakat. | Meningkatkan kesadaran dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Tuban (Kecamatan dan Kelurahan) |
| Meningkatkan fungsi Pos Polisi dalam upaya menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat hingga pada ruang lingkup pemerintahan terkecil |
| Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah Polres Tuban | Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan program-program dan pelaksanaan pencegahan penggunaan narkoba. |
| Meningkatkan proses terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkoba. |
| Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum mereka yang terlibat. |
| Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum para penjahat NAPZA. |
| Meningkatkan proses mengenali modus-modus peredaran baru dalam penyelundupan narkoba. |
| Meningkatkan pemantauan identitas masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten Tuban |
| (SS2) Penegakan Hukum Secara Berkeadilan. | Peningkatan pengungkapan kasus secara objektif dan transparan kepada Publik atau Pihak Terkait | Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Penyidik |
| Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Terkait |
| Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal Kabupaten (SPPT-TI) | Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker dan aparat penegak hukum |
| Standardisasi data kriminal Kabupaten |
| Mengembangkan sistem informasi kriminal Kabupaten yang terintegrasi |
| (SS3) Profesionalisme SDM Polres Tuban. | Peningkatan kualitas SDM di Polres Tuban | Membentuk Personel Polri berdasarkan mutu pendidikan dan pelatihan SDM yang terencana |
| Membangun sistem pengelolaan kinerja SDM Polres Tuban |
| Menyelenggarakan sistem *reward and punishment* kepada personel Polres Tuban secara objektif |
| Peningkatan kompetensi SDM di Polres Tuban | Meningkatkan jumlah SDM Polres Tuban yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |
| (SS4) Modernisasi Teknologi Polres Tuban | Menyediakan data dan informasi berbasis media yang *user friendly* | Menyediakan data dan informasi yang mudah diakses untuk kebutuhan keterbukaan informasi publik kepada media dan masyarakat di beberapa alat akses. |
| Mengelola berita atau informasi negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat |
| Memperkuat pengelolaan data operasional dalam satu sistem pengelolaan data terpusat |
| Menyediakan sarana dan prasarana Polres yang modern dan berbasis teknologi terkini | Memetakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas |
| Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan |
| Menyediakan sarana dan prasarana yang modern dan memiliki kemampuan tekhnologi terkini |
| Membangun *Big Data/Single Data Entry* |
| Meningkatkan akses informasi yang akurat |
| Meningkatkan sistem penanganan masalah |
| Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik |
| (SS5) Sistem Pengawasan Polres Tuban yang akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan melayani. | Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat | Meningkatkan inovasi pelayanan publik Polres Tuban |
| Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan SDM Polres dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan. |
| Meningkatkan kemudahan pelayanan data dan informasi |
| Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien | Meningkatkan Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| Meningkatkan kualitas perencanaan secara efektif dan efisen |
| Mengoptimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) |
| Reformasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polres | Membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri |
| Meningkatkan manajemen kinerja Polri |
| Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal |
| Memantapkan secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) |
| Monitoring dan evaluasi tata laksana Polres Tuban |
| Penataan organisasi tingkat Polres |
| Penataan organisasi tingkat Polsek |
| Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri |
| Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif | Penguatan regulasi |
| Penanganan *public complaint* secara efektif dan terpercaya |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Polres Tuban | Meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis TIK |
| Meningkatkan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat |
| Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan *up to date* |
| Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan |

## Kerangka Regulasi

Revisi …..

Kerangka regulasi diartikan sebagai gambaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Polres Tuban. Jabaran kerangka regulasi berisikan tentang arahan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran strategis yang telah direncanakan pada lima tahun ke depan, maka disusunlah kerangka regulasi berikut:

| **No** | **Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi** | **Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian** | **Unit  Penanggung Jawab** | **Unit Terkait/ Institusi** | **Target Penyelesaian** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | SOP di Lingkungan Polres Tuban dan jajarannya | Memperjelas prosedur kerja dan hubungan tata cara kerja di Lingkungan Polres Tuban dan jajaran | Kabagren | Seluruh /Satfung/Polsek jajaran Polres Tuban | 2020 |
| 2 | Hubungan Tata Cara Kerja Polres Tuban | Sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan tatacara kerja dengan satuan lainnya. | Kasubbag Hukum | Seluruh satfung yang berada di Polres Tuban | 2020 |
| 3 | Peraturan Kapolri tentang Pelayanan prima pada masing-masing Satker serta SOP pelayanan di masing-masing Satker pada era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu di tingkatkan, dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri. | Oleh karena itu peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri harus terus dilakukan penyempurnaan. | Kasubbag Hukum | Subbag Hukum dan Instansi pemerintahan dan LSM serta Universitas | 2021 |
| 4 | MoU antara Polri dengan Kementerian/lembaga /Ormas/ Swasta dalam bentuk sinergi Polisional (Spindep) masih belum optimal. | Disebabkan kerjasama selama ini berjalan secara parsial (Fungsi masing-masing) dan belum ada penanggung jawab. | Kasubbag Hukum | Subbag Hukum Sat Samapta, Satbinmas, dan Instansi pemerintahan dan LSM serta Universitas | 2020-2024 |
| 5 | Susunan organisasi dan Tata kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila disandingkan dengan Analisa beban kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada. | Belum sesuai dengan Ketentuan-ketentuan yang berlaku | Kasubbag Hukum | Subbag Hukum | 2020 |
| 6 | SOP tentang kesiapan dalam menghadapi Eskalasi menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang diakibatkan dinamika politik memerlukan perhatian khusus Polri. | Penggunaan media sosial dan kejahatan siber dalam menjaga Kamdagri guna terselengaranya Pemilu yang aman dan kondusif. | Kanit Politik | Kanit Politik dan Instansi pemerintahan dan LSM serta Universitas | 2023 |
| 7 | SOP tentang pencegahan aksi terorisme,radikalisme,dan konflik sosial yang dapat menganggu keamanan masyarakat. | Memetakan potensi terorisme radikalisme, konflik sosial, dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. | Kanit Politik, Ekonomi, Sosbud, Kamneg | Para Kanit Intelkam | 2020 |
| 11 | Peraturan tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia | Diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan pada peraturan tersendiri bagi lingkungan Polri | Satker yang menyele-nggarakan fungsi pelayanan terkait PNBP | 1. Satintelkam; 2. Satbinmas; 3. Satlantas; | 2021 |
| 12 | Peraturan penyempurnaan HTCK Satker Polres Tuban | Sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan tatacara kerja dengan satuan lainnya. | Kasubbag Hukum | Seluruh Satker Polres Tuban | 2020 |
| 13 | Peraturan tentang pokok-pokok tugas dan fungsi Siwas (pembuatan SOP) | Sebagai pedoman bagi Siwas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi | Kasiwas | Kasiwas Polres Tuban | 2020 |
| 14 | SOP dilingkungan Sium Polres Tuban diantaranya tentang Kunker, Penerimaan Tamu, Rapat, Vicon. | Memperjelas prosedur kerja dan hubungan tata kerja diingkungan Polres Tuban dan jajaran | Kasium | Seluruh Kasium Polres Tuban dan jajaran | 2020 |
| 15 | SOP tentang pengamanan Markas Komando di lingkungan Polres Tuban | 1. sebagi pedoman dalam pelaksanaan tugas pengamanan Markas Komando di lingkungan Polri (Polda, Polrestabes/ Polrsta/Polres dan Polsek);  2. terwujudnya kepastian hukum dan tidak terjadinya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri maupun tindakan pidana dalam rangka pengamanan Markas Komando di lingkungan Polres Tuban. | Kasi-propam | 1. Satsamapta; 2. Subbag-hukum; | 2020 |
| 16 | Perkap nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tatacara pemeriksaan saksi dan korban tindak pidana | Perubahan substansi dan redaksional penyesuaian dengan OTK Polri | Satreskrim | 1. Satreskrim 2. Satresnarkoba | 2021 |
| 17 | SOP tentang penanganan Dumas | Sebagai pedoman pelaksanaan penanganan Dumas dengan tujuan kegiatan pengawasan penyidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk meninimalisisr komplin masyarakat | Siwas | 1. Sipropam 2. Satreskrim 3. Satresnarkob 4. Satlantas | 2020 |
| 18 | Perkap No. 10 Tahun 2009 tentang Tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik kepolisian negara Republik Indonesia | Dalam proses revisi, menunggu tahap harmonisasi dengan Bidkum | Identifikasi | 1. Satreskrim 2. Satresnarkoba | 2021 |
| 19 | Perkap No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pusat informasi kriminal nasional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Penyesuaian dengan server Piknas Mabes Polri | Satreskrim | 1. Bagops 2. SPKT 3. Satreskrim 4. Satresnarkoba | 2021 |
| 20 | Perkap No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana | Mewujudkan penyidik Polri yang profesional dan penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan | Bagops  SPKT | 1. Bagops 2. SPKT 3. Satreskrim 4. Satresnarkoba | 2020 |
| 21 | SOP tentang Mekanisme pengangkatan penyidik dan penerbitan keputusan penyidik | Memberikan kejelasan dan ketegasan tentang siapa yang bisa menjadi penyidik dan siapa yang berhak untuk melakukan pengangkatan penyidik | Satreskrim | 1. Bagsumda 2. Satreskrimum 3. Satresnarkoba 4. Satlantas | 2020 |
| 22 | Perkap nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/waktu korban tindak pidana | Perubahan substansi dan redaksional penyesuaian dengan OTK Polri | Satres-narkoba | a. Satres-narkoba  b. Satreskrim | 2020 |
| 23 | Perkap No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pusat informasi kriminal nasional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Penyesuaian dengan *server* Piknas Mabes Polri | Satres-narkoba | a. SPKT  b. Subbag- humas,  c. Sitipol | 2020 |
| 24 | Perkap No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana | Mewujudkan penyidik Polri yang profesional dan penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan | Satres-narkoba | Bagops | 2020 |
| 25 | Perkap No. 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil | Terjalinnya kemitraan melalui kerja sama dengan penyidik PPNS | Satreskrim | Satreskrim | 2020-2024 |
| 26 | Perkap Nomor 06 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan | Mewujudkan hasil penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan | Satres-narkoba, Satreskrim, Satlantas | Subbaghukum; Sipropam | 2021 |
| 27 | Perkap No. 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil | Terjalinnya kemitraan melalui kerja sama dengan penyidik PPNS | Satreskrim | Korwas PPNS | 2020 |
| 28 | SOP tentang Penerimaan Pelaporan tindak Pidana | Sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan Penerimaan Pelaporan tindak Pidana yang menyesuaikan dengan kebijakan Pimpinan | SPKT | 1. Siwas 2. Satreskrim 3. Satrekoba | 2020 |
| 31 | SOP tentang Penerimaan anggota Polri terpadu Akpol, Brigadir dan Tamtama | Sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan Penerimaan anggota Polri terpadu Akpol, Brigadir dan Tamtama serta menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan Kapolri pada tahun berjalan | Kabag sumda | 1. Siwas 2. Sipropam 3. Kaurdokkes | 2020-2024 |
| 32 | SOP tentang Penerimaan SIPSS | Sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan Penerimaan anggota Polri sumber sarjana serta menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan Kapolri pada tahun berjalan | Kabag sumda | 1. Siwas 2. Sipropam 3. Kaurdokkes | 2020-2024 |
| 33 | SOP tentang Seleksi pendidikan pengembangan Polri | Dalam pelaksanaan seleksi Dikbang belum mempunyai acuan berupa Perpol. | Kabag sumda | 1. Siwas 2. Sipropam 3. Kaurdokkes | 2020-2024 |
| 36 | SOP tentang Kenaikan Pangkat Reguler bagi anggota Polri. | Realitanya terdapat penumpukan pada kepangkatan tertentu sedangkan ruang jabatan yang tersedia terbatas, sedangkan masa dinas masih panjang, sehingga dikhawatirkan terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas dalam jabatan tertentu. | Kabag-sumda | Seluruh Satfung dan jajaran | 2021 |
| 37 | SOP tentang Masa Dinas Surut bagi anggota Polri yang berijasah Sarjana/Diploma | Untuk menjaring calon anggota Polri dari sumber sarjana/diploma yang diproyeksikan dalam dinas kepolisian sesuai dengan keahlian tertentu masih di temukan kendala, sehingga untuk menarik minat para calon maka diberlakukan masa  dinas surut | Kabag-sumda | 1. Siwas 2. Sipropam 3. Urdokes | 2021 |
| 38 | SOP tentang Penyelenggaraan *Assessment Center* | Bahwa dalam penyelenggaraan Assesment center telah diterbitkan Peraturan AS SDM tahun 2015. | Kabag-sumda |  | 2021 |
| 39 | SOP tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri. | Pada realitanya dalam penentuan mutasi jabatan atau penempatan personel dalam suatu jabatan tertentu khususnya yang bersifat strategis perlu mempertimbangkan latar belakang personel ybs antara lain track record/rekam jejak dalam pelaksanaan tugas, sehingga diharapkan personel yang tidak pernah cacat dalam tugasnya mendapatkan kesempatan yang proporsional dibandingkan dengan personel yang mempunyai cacat dalam tugas. Hal ini guna menghindari adanya Komplain dari masyarakat dan dalam rangka menumbuhkan motivasi bagi anggota yang lain. | Kabag-sumda | Seluruh Satfung | 2020 |
| 40 | SOP tentang Tata cara pelatihan ketrampilan pra pensiun | Pada kegiatan pelatihan ketrampilan pra pensiun perlu revisi Perkap yang sudah ada (Perkap No 08 tahun 2015). | Kabag-sumda | Lembaga/  kementerian/  instansi terkait | 2021 |
| 41 | SOP tentang Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri | Pada kegiatan penugasan anggota Polri di luar struktur diperlukan revisi Perkap (Perkap No. 13 tahun 2014). | Kabag-sumda | Lembaga/ kementerian/instansi terkait | 2020 |
| 42 | SOP tentang pelayanan (KTA, SIO BUJP dan pelatihan, HUTTT Satpam) Kemitraan/ kerjasama, pembinaan dilingkungan Satker Satbinmas Polres Tuban. | Memperjelas prosedur kerja dan hubungan tata cara kerja dilingkungan Satbinmas Polres Tuban | Satbinmas | Satbinmas Polres Tuban | 2021 |
| 43 | SOP tentang pengamanan Mako, penanggulangan kebakaran, pemakaman, penggunaan Senpi, menempati rumah dinas. | Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat kepolisian Resor | Kasium | Seluruh Satfung Polres Tuban | 2020 |

## Kerangka Kelembagaan

Secara internal peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagai aparatur negara merupakan kunci pokok utama dalam pelaksanaan organisasi. Secara eksternal kemampuan Polres Tuban mengelola stakeholders eksternal merupakan tantangan tersendiri sehingga perlu disusun kerangka kelembagaan dalam pengelolaan dinamika organisasi dalam membangun struktur kelembagaan yang diinginkan. Kerangka kelembagaan berisikan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang dibutuhkan serta tata laksana baik internal maupun eksternal sebagai berikut.

| **Sasaran Strategis** | **Strategi** | **Program dan Kegiatan** | **Sasaran** | **Target** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Terwujud-nya tata kelola Polres Tuban yang bersih, terbuka dan melayani | 1. Monitoring dan evaluasi tata laksana Polres Tuban. | 01 Program dukungan manajemen |  |  |  |  |  |  |
| 5053 Reformasi Birokrasi Polri. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Monev organisasi Polres Tuban dan Polsek jajaran. | Satfung: Satpolair | 1  Satfung | 1  Satfung | 1  Satfung | 1  Satfung | 1  Satfung |
| TK Polsek : Polsek Bancar, Polsek Jatirogo, Polsek Jenu, Polsek Soko, Polsek Tuban dan Polsek | 6  Polsek | 6  Polsek | 6  Polsek | 6  Polsek | 6  Polsek |

**STRUKTUR ORGANISASI POLRES**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES TUBAN

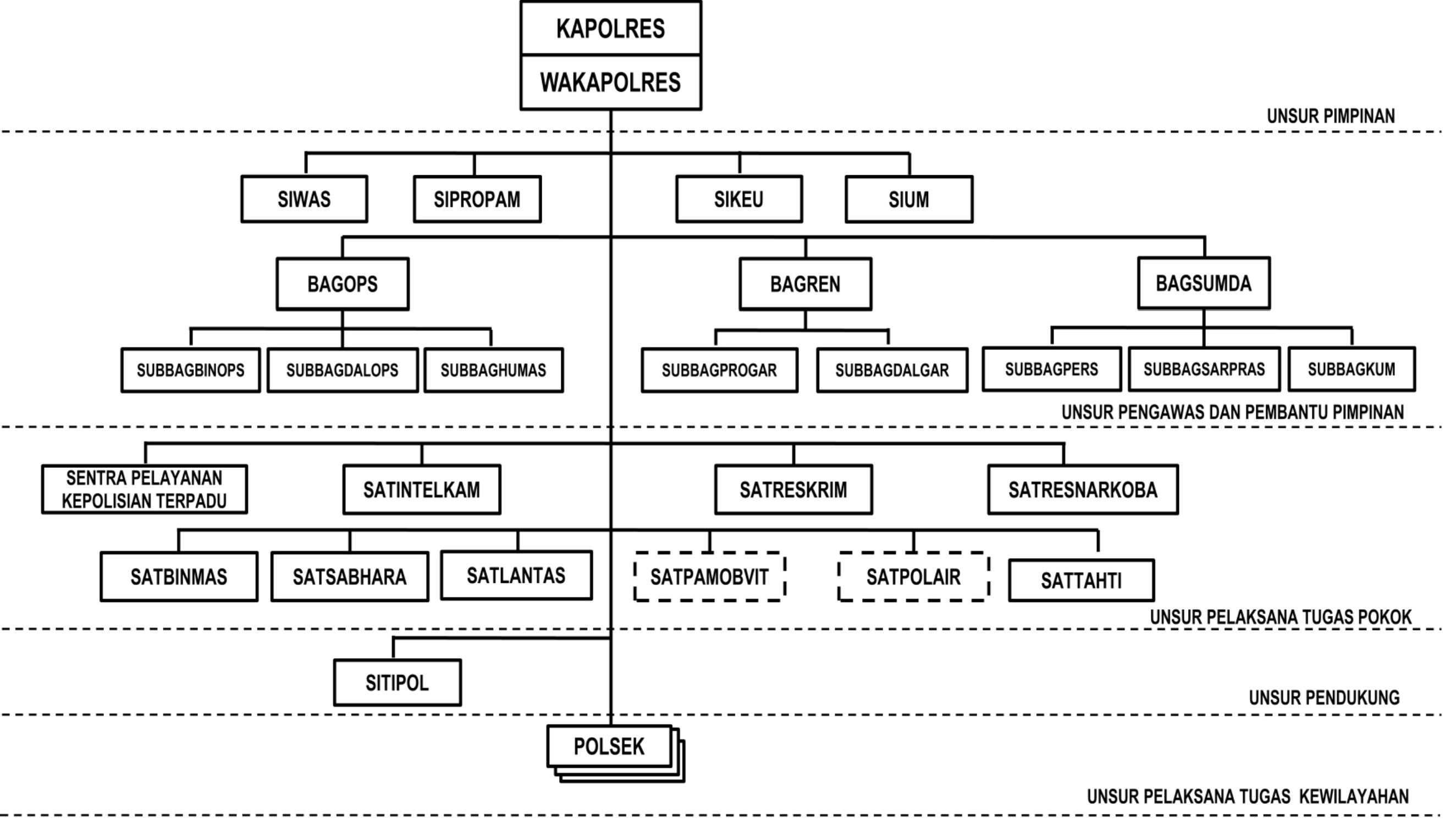
NOMOR : KEP / / I / 2020

TANGGA : AGUSTUS 2020

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES TUBAN

NOMOR : KEP / / X / 2020

TANGGAL : OKTOBER 2020



63

# BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## Target Kinerja Polres Tuban 2020-2024

Polres Tuban menetapkan 5 (lima) tujuan yang didukung dengan 5 (lima) sasaran strategis yang merupakan kondisi nyata yang ingin dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi 2020-2024. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, maka Polres Tuban menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel di bawah ini menguraikan target-target kinerja yang dimaksud, disajikan sesuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

| **Tujuan/Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target** | | | | | **Unit Penanggung Jawab** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **IK IMPACT** | | | | | | | |
| ***Stakeholder*** | | | | | | | |
| (SI) Kemanaan dan Ketertiban Kaupaten | (IKU Polres Tuban) Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten | 3,14 | 3,46 | 3,37 | 3,42 | 3,41 | Seluruh  Satfung dan Polsek jajaran |
| **IK UTAMA** | | | | | | | |
| ***Internal Process*** | | | | | | | |
| Tujuan 1 :  Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Tuban  Sasaran 1 : Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat | (IKU1) Indeks Harkamtibmas Polres Tuban | 67,77 | 69,73 | 72,11 | 74,12 | 76,00 | SatIntel, SatBinmas, SatSamapta, SatLantas, Bagops, Satreskrim dan Satnarkoba |
| Tujuan 2 :  Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Tuban.  Sasaran 2 :  Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan | (IKU2) Indeks Gakkum Polres Tuban | 62,99 | 68,70 | 69,29 | 69,85 | 62,98 | SatReskrim, SatLantas, SatPolairud |
| **IK PENUNJANG** | | | | | | | |
| ***Innovation*** | | | | | | | |
| Tujuan 3 :  Terwujudkan SDM Polres Tuban yang profesional  Sasaran 3 :  Profesionalisme SDM Polres Tuban | (IKP1) Indeks Profesionalitas SDM Polres Tuban | 39 | 44 | 44 | 44 | 52 | Bagsumda |
| Tujuan 4 :  Terwujudnya Modernisasi pelayanan Polres Tuban  Sasaran 4 :  Modernisasi Teknologi Polres Tuban | (IKP3) Survey Kepuasan Penggunaan Jaringan Komunikasi Radio dan Data | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | Sitipol |
| (IKP4) Persentase Terpenuhinya Pengajuan Dukungan Almatsus Polri | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | Subbagsarpras |
| (IKP5) Persentase Counter Opini Negatif | 69% | 60% | 62% | 64% | 66% | Subbaghumas |
| Tujuan 5 :  Terwujudnya manajemen Polres Tuban yang terintegrasi dan terpercaya  Sasaran 5 :  Terwujudnya tata kelola Polres Tuban yang bersih, terbuka dan melayani. | (IKP6) Nilai AKIP | 68,86 | 68,87 | 68,97 | 68,98 | 69 | Siwas |
| (IKP7) Nilai RBP | 79,5 | 80,61 | 81,46 | 82 | 84 | Bagren |
| (IKP8) Indeks Kepuasan Layanan Polres Tuban | 97,02 | 97,22 | 97,42 | 97,62 | 97,82 | Satlantas, Urdokkes, SPKT, Satintel, Satbinmas |
| (IKP9) Nilai Kinerja Anggaran | 97,52 | 97,72 | 97,92 | 98,12 | 98,32 | Bagren |
| (IKP10) Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | 71,3% | 73,3% | 75,3% | 77,3% | 79,3% | Siwas, Sipropam, Satreskrim |
| (IKP11) Persentase Kemenangan dalam pemberian bantuan hukum | 60,0% | 60,2% | 60,4% | 60,6% | 60,8% | Subbaghukum |

## Kerangka Pendanaan

Menggalang …..

Kerangka pendanaan adalah tabel yang berisi uraian pendanaan secara keseluruhan yang akan dibutuhkan oleh organisasi terkait untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pendanaan Polres Tuban yang ada dalam kerangka pendanaan dapat bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Renstra Polres Tuban Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

* 1. Kerangka Pendanaan Program TA 2020

| **Kode** | **Uraian** | **Pagu 2020** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri** | 75.142.146.000 |
| 3070 | Penerangan Masyarakat |  |
| 3073 | Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri |
| 5054 | Manajemen Anggaran |
| 5056 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| **2** | **Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Polri** | 11.657.477.000 |
| 5059 | Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras |  |
| 5062 | Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri |
| **3** | **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri** | 83.845.000 |
| 3087 | Dukma dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan |  |
| 3088 | Pertanggungjawaban Profesi |
| 3089 | Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri |
| 3090 | Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri |
| 3091 | Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan |
| **7** | **Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban** | 2.163.646.000 |
| 3111 | Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban |  |
| 3112 | Analisis Keamanan |
| 3114 | Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik |
| 3115 | Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi |
| 3116 | Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya |
| 3117 | Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara |
| **9** | **Pemberdayaan Potensi Keamanan** | 4.004.885.000 |
| 5076 | Pembinaan Potensi Keamanan |  |
| **10** | **Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat** | 8.685.395.000 |
| 3128 | Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat |  |
| 3130 | Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara |
| 3131 | Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital |
| 3133 | Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas |
| 5077 | Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan |
| 5080 | Pengendalian Operasi Kepolisian |
| **11** | **Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana** | 4.868.978.000 |
| 3137 | Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana |  |
| 3140 | Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana |
| 3142 | Penindakan Tindak Pidana Umum |
| 3144 | Penindakan Tindak Pidana Narkoba |
| 3146 | Penindakan Tindak Pidana Korupsi |
| **13** | **Pengembangan Hukum Kepolisian** | 20.000.000 |
| 3155 | Penyusunan dan Penyuluhan Hukum |  |
|  | **Jumlah** | **106.626.372.000** |

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES TUBAN

NOMOR : KEP / 5 /X/2020

TANGGAL : 3 OKTOBER 2020

* 1. Kerangka Pendanaan Program TA 2021-2024

70

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Kegiatan** | **T.A. 2021** | **T.A. 2022** | **T.A. 2023** | **T.A. 2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01.BI** | **Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana** | 4.737.570.000 | 4.974.448.500 | 5.223.170.925 | 5.484.329.471 |
| 3137 | Dukungan manajemen dan teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana |  |  |  |  |
| 3140 | Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana |  |  |  |  |
| 3142 | Penindakan Tindak Pidana Umum |  |  |  |  |
| 3144 | Penindakan Tindak Pidana Narkoba |  |  |  |  |
| 3146 | Penindakan Tindak Pidana Korupsi |  |  |  |  |
| 4343 | Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas |  |  |  |  |
| **01.BP** | **Program Modernisasi Almatsus Dan Sarana Prasarana Polri** | 10.636.858.000 | 11.275.069.480 | 11.951.573.649 | 12.668.668.068 |
| 5059 | Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras |  |  |  |  |
| 5062 | Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri |  |  |  |  |
| **01.BQ** | **Program Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat** | 12.917.962.000 | 13.563.860.100 | 14.242.053.105 | 14.954.155.760 |
| 3112 | Analisis Keamanan |  |  |  |  |
| 3114 | Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik |  |  |  |  |
| 3115 | Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi |  |  |  |  |
| 3116 | Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya |  |  |  |  |
| 3117 | Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara |  |  |  |  |
| 3128 | Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat |  |  |  |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES TUBAN

NOMOR : KEP / 5 /X/2020

TANGGAL : 3 OKTOBER 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Kegiatan** | **T.A. 2021** | **T.A. 2022** | **T.A. 2023** | **T.A. 2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3130 | Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara |  |  |  |  |
| 3131 | Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital |  |  |  |  |
| 3133 | Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masy. di Bidang Lantas |  |  |  |  |
| 5076 | Pembinaan Potensi Keamanan |  |  |  |  |
| 5077 | Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan |  |  |  |  |
| 5080 | Pengendalian Operasi Kepolisian |  |  |  |  |
| **01.WA** | **Program Dukungan Manajemen** | 69.785.650.000 | 73.274.932.500 | 76.938.679.125 | 80.785.613.081 |
| 3070 | Penerangan Masyarakat |  |  |  |  |
| 3073 | Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri |  |  |  |  |
| 3088 | Pertanggungjawaban Profesi |  |  |  |  |
| 3089 | Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri |  |  |  |  |
| 3090 | Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri |  |  |  |  |
| 3091 | Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan |  |  |  |  |
| 3155 | Kerjasama dan Penyuluhan Hukum |  |  |  |  |
| 5053 | Reformasi Birokrasi Polri |  |  |  |  |
| 5054 | Manajemen Anggaran |  |  |  |  |
|  | **JUMLAH** | **98.078.040.000** | **103.088.310.580** | **108.355.476.804** | **113.892.766.380** |

71

# BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resor 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polres Tuban yang menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Tuban dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di bidang keamanan dan ketertiban nasional.

Dokumen ini merupakan naskah hidup yang perlu ditinjau secara berkala sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, serta arah bijak Polri sebagai institusi pemayung Polres Tuban. Oleh karena itu, kontribusi dan peran aktif dari seluruh unit kerja Polres Tuban sangat dibutuhkan tidak hanya dalam implementasi strategi kinerja yang telah dipaparkan dalam Renstra, tetapi juga dalam menilai relevansi daripada setiap tujuan, sasaran strategis, dan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## Kaidah Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan strategi dan langkah kerja yang telah disusun dalam Renstra Polres Tuban 2020-2024 ini, unit kerja Polres Tuban seyogianya dapat menginternalisasi 4 (empat) kaidah fundamental sebagai berikut:

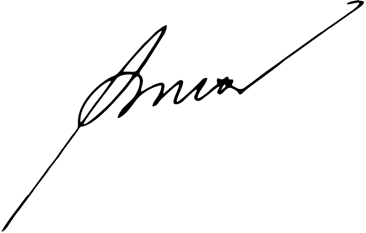
1. Mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan negara (Polisi) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
2. Mengutamakan tindakan preventif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
3. Mengedepankan strategi *community policing*. Perlu dilakukan perubahan pola penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
4. Senantiasa membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

## Autentifikasi dan Distribusi

1. Autentifikasi Renstra Polres Tuban 2020-2024 merupakan jabaran dari RPJMN, yang telah disahkan oleh Kapolres Tuban sebagai pimpinan sekaligus pejabat pengguna anggaran;
2. Renstra Polres Tuban 2020-2024 selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Satfung dan Polsek jajaran Polres Tuban untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program untuk mencapai *outcome*.

Ditetapkan di: Tuban

pada tanggal: 3 Oktober 2020



KEPALA KEPOLISIAN RESOR TUBAN

RURUH WICAKSONO, S.I.K., S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78090891

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres Tuban Tahun 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Soekanto, S. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Grafindo. [↑](#footnote-ref-2)